

# RENCANA KERJA 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

menuju masyarakat informatif

# HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Pemerintahan

Petugas Verifikator

Ewiek Khavida, S.STP, MM  
NIP. 198311182002122001

Aziz Sugiharto, S.AP  
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197405082003121008

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juni 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2023 .....	10
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo .....	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan .....	86
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	87
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	94
2.6 Inovasi Perangkat Daerah .....	94
2.7 Penghargaan .....	96
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....	98
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	98
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo .....	99
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	103
4.1 Program dan Kegiatan .....	103
BAB V. PENUTUP .....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2023
- Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Triwulan I Tahun 2024
- Tabel 2.3 : Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2024 Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.4 : Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2020-2024
- Tabel 2.5 : Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024
- Tabel 2.6 : Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
- Tabel 2.7 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Temanggung dari Tahun 2020-2024
- Tabel 2.8 : Predikat Indeks SPBE
- Tabel 2.9 : Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2020-2024
- Tabel 2.10 : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023
- Tabel 2.11 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
- Tabel 2.12 : Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang aktif
- Tabel 2.13 : Keaktifan Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo
- Tabel 2.14 : Lembaga Penyiaran Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.15 : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.16 : Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2024
- Tabel 2.17 : Konten Diseminasi Informasi Media dan kanal Komunikasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2024
- Tabel 2.18 : Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo
- Tabel 2.19 : Rekapitulasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan Masyarakat Sd. Triwulan I Tahun 2024
- Tabel 2.20 : Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik di Kab. Temanggung Sd. Triwulan I Tahun 2024
- Tabel 2.21 : Data Jumlah OPD yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.22 : Data Kantor/Badan/Dinas yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2024
- Tabel 2.23 : Data Kecataman yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Tahun 2024
- Tabel 2.24 : Data Kelurahan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Tahun 2024
- Tabel 2.25 : Persentase Layanan Publik Secara Elektronik Kabupaten Temanggung sd. Triwulan I Tahun 2024

- Tabel 2.26 : Daftar Layanan Publik Yang Ditetapkan
- Tabel 2.27 : Daftar Layanan Publik Secara Elektronik
- Tabel 2.28 : Ketersediaan Data Statistik Sektoral Sd. Triwulan I Tahun 2024
- Tabel 2.29 : Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2024
- Tabel 2.30 : Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi
- Tabel 2.31 : Nilai Indek KAMI Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.32 : Tabel Penilaian Indek Kami
- Tabel 2.33 : Kategori Sistem Elektronik Untuk penilaian indik KAMI
- Tabel 2.34 : Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah
- Tabel 2.35 : Aplikasi yang sudah dilakukan Vulnerability Assesment (VA) Tahun 2024
- Tabel 2.36 : *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
- Tabel 2.37 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2024
- Tabel 2.38 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023
- Tabel 3.1 : Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025
- Tabel 4.1 : Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025
- Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 : Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
- Gambar 2.2 : Berita PPID Pemkab Temanggung Berhasil Raih Kategori Informatif
- Gambar 2.3 : Grafik koneksi internet di OPD
- Gambar 2.4 : Grafik koneksi internet di Kecamatan
- Gambar 2.5 : Grafik koneksi internet di Kelurahan
- Gambar 2.6 : Hasil Penilaian Mandiri Indek KAMI Tahun 2024
- Gambar 2.7 : Alur Layanan ITSA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

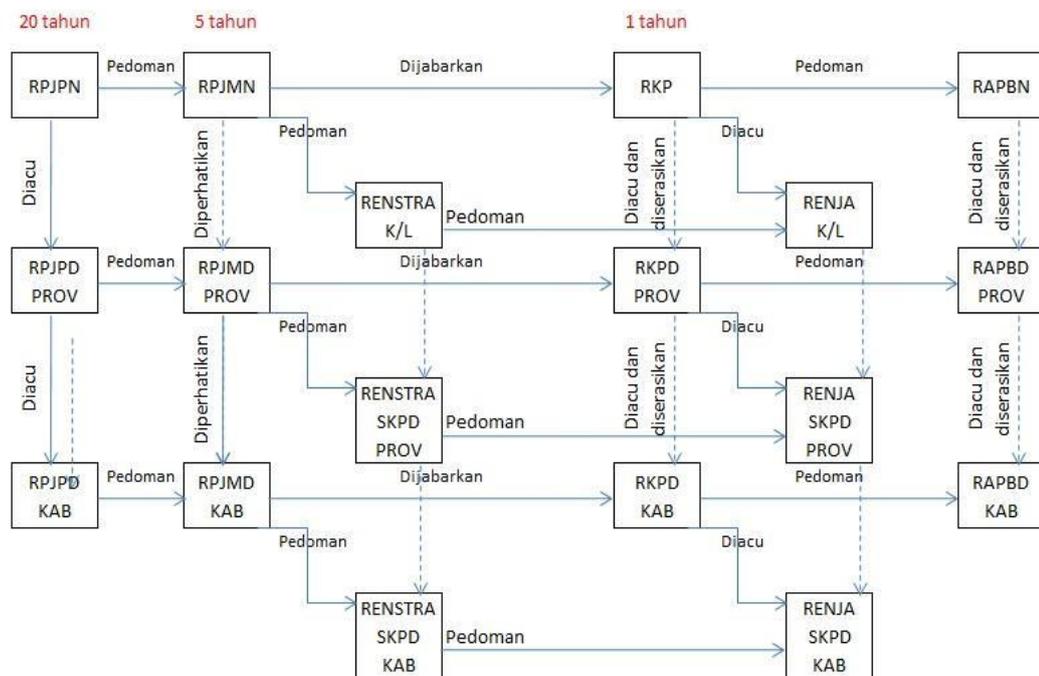
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinkominfo Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinkominfo, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinkominfo;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinkominfo;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinkominfo.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun lalu berdasarkan renstra Dinkominfo;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinkominfo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra

Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinkominfo;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinkominfo;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinkominfo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinkominfo;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkominfo;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinkominfo.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinkominfo;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi

birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

**1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinkominfo Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun lalu yaitu Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2023

1	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				17.072.437.979		4.026.854.238	4.258.733.579		4.182.419.956		98,21
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				15.689.802.459		3.749.103.038	3.641.065.179		3.584.153.548		98,44
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	5.689.802.459	32	3.749.103.038	3.641.065.179	32	3.584.153.548	100	98,44
1.2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tunjangan ASN</b>			664.400.000		305.756.000	300.000.000		297.493.614		99,16
1.2.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang/Bulan	70	664.400.000	5000	305.756.000	300.000.000	5.000	297.493.614	100	99,16
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>			619.709.620		90.784.200	132.528.000		132.100.501		99,68
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	45.659.800	4	5.000.000	5.000.000	4	5.000.000	100	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	54.386.560	3	-	39.982.000	3	39.696.000	100	99,28
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	68.883.660	4	13.000.000	14.798.500	4	14.773.200	100	100
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	60	49.495.600	6	9.500.000	9.500.000	6	9.500.000	100	100
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	130.818.000	12	30.284.200	30.260.000	12	30.216.500	100	99,86

1	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	270.466.000	12	33.000.000	32.987.500	12	32.914.801	100	99,78
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			<b>474.732.200</b>		<b>118.967.000</b>	<b>117.150.400</b>		<b>102.394.355</b>		<b>87,40</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Surat menyurat	Laporan	60	10.060.000	12	3.075.000	2.060.000	12	2.030.000	100	98,54
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	48.642.000	12	6.000.000	5.200.000	12	4.975.878	100	95,69
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	70.285.800	12	11.000.000	10.999.000	12	10.755.000	100	97,78
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	345.744.400	12	98.892.000	98.891.400	12	84.633.477	100	85,58
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>288.193.700</b>		<b>68.000.000</b>	<b>67.990.000</b>		<b>66.277.938</b>		<b>97,48</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	288.193.700	26	68.000.000	67.990.000	26	66.277.938	100	97,48
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>10.781.828.850</b>		<b>5.431.552.400</b>	<b>4.464.990.300</b>		<b>4.393.636.457</b>		

1	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>10.781.828.850</b>		<b>5.431.552.400</b>	<b>4.464.990.300</b>		<b>4.393.636.457</b>		<b>98,40</b>
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok	60	9.099.136.650	12	5.081.936.000	3.679.143.500	12	3.629.176.847	100	98,64
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok	60	640.308.400	12	83.148.000	83.148.000	12	79.406.077	100	95,50
2.1.3	Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Hubungan Media	Dok	9	454.831.800	1	-	600.000.000	1	583.000.000	100	97,17
2.1.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	60	587.552.000	264	266.468.400	102.698.800	264	102.053.533	100	99,37
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>13.302.467.000</b>		<b>2.906.578.624</b>	<b>2.505.876.300</b>		<b>2.487.622.229</b>		<b>99,27</b>
3.1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>8.723.694.100</b>		<b>1.658.564.656</b>	<b>1.555.718.000</b>		<b>1.553.351.642</b>		<b>99,85</b>
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	8.723.694.100	1	1.658.564.656	1.555.718.000	1	1.553.351.642	100	99,85
3.2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.578.772.900</b>		<b>1.248.013.968</b>	<b>950.158.300</b>		<b>934.270.587</b>		<b>98,33</b>
3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	60	1.417.844.400	12	27.322.328	27.322.300	12	22.503.385	100	82,36

1	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	462	1.175.464.500	15	110.924.656	135.618.000	15	128.479.269	100	94,74
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dok	60	1.257.725.500	12	184.766.984	62.218.000	12	58.287.933	100	93,68
3.2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemereintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok	60	727.738.500	12	925.000.000	725.000.000	12	725.000.000	100	100
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>1.385.711.900</b>		<b>302.833.000</b>	<b>107.833.000</b>		<b>106.120.024</b>		<b>98,41</b>
4.1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.385.711.900</b>		<b>302.833.000</b>	<b>107.833.000</b>		<b>106.120.024</b>		<b>98,41</b>
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok.	3	1.118.056.400	3	275.000.000	80.000.000	3	78.974.894	100	98,72
4.2.1	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok.	1	267.655.500	1	27.833.000	27.833.000	1,00	27.145.130	100	97,53
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				<b>199.068.300</b>		<b>97.752.500</b>	<b>50.000.000</b>		<b>49.643.500</b>		<b>99,29</b>

1	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN /	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				199.068.300		97.752.500	50.000.000		49.643.500		99,29
5.1.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	26	199.068.300	26	97.752.500	50.000.000	26	49.643.500	100	99,29
	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>42.741.514.029</b>		<b>12.765.570.762</b>	<b>11.387.433.179</b>		<b>11.219.442.166</b>		<b>98,52</b>

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo  
s.d Triwulan I Tahun 2024

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN sd 2024	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				4.067.136.433		3.784.225.483	4.964.739.428		849.610.766		849.610.766		17,11
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				3.456.636.433		3.456.618.083	4.156.201.328		735.526.150		735.526.150		17,70
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	3.456.636.433	33	3.456.618.083	4.156.201.328	33	735.526.150	33	735.526.150	100	17,70
1.2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tunjangan ASN</b>			242.500.000		242.500.000	500.000.000		65.366.500		65.366.500		13,07
12.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang/Bulan	100	242.500.000	5000	242.500.000	500.000.000	-	65.366.500	-	65.366.500	0,00	13,07
1.3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Peraturan Perundang-Undangan</b>			170.500.000		138.958.500	119.940.000		10.885.750		10.885.750		9,08
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	7.000.000	5	5.000.000	4.995.500	1	260.000	1	260.000	20,00	5,20
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	70.000.000	3	46.498.000	27.500.000	-	0	-	-	0,00	0,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	100	18.000.000	12	16.000.000	16.001.000	1	93.000	1	93.000	8,33	100
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	100	10.500.000	12	9.500.000	9.500.000	3	1.816.250	3	1.816.250	25,00	19,12
1.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	100	30.000.000	12	27.982.000	27.982.000	3	5.132.000	3	5.132.000	25,00	18,34
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	35.000.000	36	33.978.500	33.961.500	10	3.584.500	10	3.584.500	27,78	10,55

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN sd 2024	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			<b>127.500.000</b>		<b>120.648.900</b>	<b>120.604.100</b>		<b>25.589.866</b>		<b>25.589.866</b>		<b>21,22</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Surat menyurat	laporan	100	4.000.000	36	3.150.000	3.150.000	-	0	-	-	0,00	0,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	100	9.000.000	12	7.000.000	7.000.000	3	1.790.786	3	1.790.786	25,00	25,58
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	100	13.500.000	24	11.500.000	11.457.200	-	0	-	-	0,00	0,00
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	100	101.000.000	12	98.998.900	98.996.900	3	23.799.080	3	23.799.080	25,00	24,04
1.5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>70.000.000</b>		<b>68.000.000</b>	<b>67.994.000</b>		<b>12.242.500</b>		<b>12.242.500</b>		<b>18,01</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	100	70.000.000	12	68.000.000	67.994.000	3	12.242.500	3	12.242.500	25,00	18,01
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				<b>3.571.014.912</b>		<b>4.035.570.500</b>	<b>3.243.331.100</b>		<b>429.584.596</b>		<b>429.584.596</b>		
2.1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>3.571.014.912</b>		<b>4.035.570.500</b>	<b>3.243.331.100</b>		<b>429.584.596</b>		<b>429.584.596</b>		<b>13,25</b>
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dok	100	3.315.363.500	12	3.506.363.500	2.984.444.300	3	406.544.145	3	406.544.145	25,00	13,62
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dok	100	167.148.000	12	153.148.000	83.148.000	3	16.756.393	3	16.756.393	25,00	20,15
2.1.3	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	100	88.503.412	40	376.059.000	175.738.800	-	6.284.058	-	6.284.058	0,00	3,58

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN sd 2024	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				1.748.228.335		1.915.398.360	2.046.932.300		241.318.232		241.318.232		11,79
3.1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				1.514.662.360		1.514.661.860	1.714.661.500		220.710.116		220.710.116		12,87
3.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dok	100	32.000.000	12	31.999.500	31.999.500	3	2.199.000	3	2.199.000	25,00	6,87
3.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	100	1.482.662.360	12	1.482.662.360	1.682.662.000	12	218.511.116	12	218.511.116	100,00	12,99
3.2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				233.565.975		400.736.500	332.270.800		20.608.116		20.608.116		6,20
3.2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	100	54.322.300	1	119.322.300	75.716.000	1	6.284.058	1	6.284.058	100,00	8,30
3.2.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	100	96.976.691	15	79.622.800	79.077.500	5	7.340.000	5	7.340.000	100,00	9,28
3.2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dok	100	82.266.984	12	201.791.400	177.477.300	3	6.984.058	3	6.984.058	25,00	3,94
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				108.914.026		127.833.000	102.832.800		7.011.558		7.011.558		6,82
4.1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				108.914.026		127.833.000	102.832.800		7.011.558		7.011.558		6,82
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok.	100	81.081.026	10	100.000.000	75.000.000	2	727.500	2	727.500	20,00	0,97

No	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN sd 2024	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1.2	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok.	100	27.833.000	12	27.833.000	27.832.800	3	6.284.058	3	6.284.058	25,00	22,58
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				50.501.250		70.000.000	100.000.000		14.680.500		14.680.500		14,68
5.1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				50.501.250		70.000.000	100.000.000		14.680.500		14.680.500		14,68
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		laporan	100	50.501.250	12	20.000.000	50.000.000	3	4.690.500	3	4.690.500	25,00	9,38
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	100	-	12	50.000.000	50.000.000	4	9.990.000	4	9.990.000	33,33	19,98
	<b>BELANJA DAERAH</b>						9.933.027.343	10.457.835.628		1.542.205.652		1.542.205.652		14,75

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinkominfo Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai Keterbukaan Informasi Publik tercapai memperoleh nilai 97,38 melebihi target yang ditetapkan yaitu 96,00 atau tercapai 100% dan masuk dalam kategori tertinggi yaitu kategori INFORMATIF berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Badan Publik Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Perolehan angka ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,24% dan merupakan prestasi tertinggi sejak PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sejak tahun 2012.

Faktor pendorong capaian kinerja sasaran ini antara lain adalah “meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID utama, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan, dan pembinaan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur”.

2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:

- a. *Persentase PPID Badan Publik yang aktif* tercapai 100%, target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 20% dan terealisasi 23,46%. Dari 341 badan publik yang menjadi kewenangan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Kabupaten Temanggung, tercatat ada 80 PPID pelaksana yang masuk dalam kategori aktif, angka tersebut meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya terdapat 62 PPID yang aktif.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja tersebut adalah keaktifan dari PPID utama Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan jemput bola kepada PPID pelaksana. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin

terkait kelengkapan kelembagaan dan data PPID pelaksana setiap triwulan.

Sementara Faktor yang menjadi penghambatnya adalah masih belum kuatnya kesadaran di tingkat PPID Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan juga kendala keterbatasan kompetensi SDM pelaku PPID.

- b. *Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif* tercapai 100% dengan realisasi sebesar 78,89% melampaui atas target yang ditetapkan sebesar 30%.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja ini adalah melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dengan melakukan kegiatan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dari 90 KIM tercatat ada 71 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Adapun faktor pendorong capaian kinerja ini adalah semangat masyarakat dalam turut serta mendesiminasikan dan meningkatkan literasi informasi.

- c. *Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran* capaiannya cukup stabil dari tahun ketahun yaitu 100%. Hal ini didukung oleh kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja ini adalah Pemahaman dan kepatuhan merata insan penyiaran terhadap P3 (Pedoman Program Siaran) dan SPS (Standar Program Siaran).

- d. *Persentase ketersediaan akses internet publik* tercapai 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya tercapai 80%. Rumus capaian tersebut menghitung jumlah ketersediaan akses internet publik sebanyak 60 titik dibagi jumlah keberadaan area publik yang ada di Kabupaten Temanggung sejumlah 60 titik. Faktor pendorong ketercapaian indikator tersebut terdiri atas faktor teknis dan non teknis. Secara teknis ada beberapa hal yang

mendorong capaian indikator tersebut diantaranya adalah “Ketercukupan bandwidth untuk area publik dan tersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik.

- e. *Persentase ketersediaan jaringan intranet* target 100 terealisasi 100 atau tercapai 100%. Angka presentasi ketersediaan jaringan intranet diperoleh dari rumus jumlah OPD, UPT dan Desa/Kelurahan yang terhubung dengan jaringan dari Dinkominfo (sejumlah 384) dibagi dengan jumlah seluruh OPD, UPT dan Desa/Kelurahan dikali 100%.

Faktor pendorong ketercapaian indikator ketersediaan jaringan intranet salah satunya adalah Telah tersedia *repeater* di beberapa lokasi yang dapat mendukung koneksi jaringan ke kantor-kantor pemerintah.

- f. *Persentase sistem informasi yang terintegrasi* tercapai 100%. Target yang ditetapkan adalah 50% dan terealisasi 51,43%. Pada tahun 2023 ini terdapat 54 sistem informasi yang sudah terintegrasi dari 105 sistem informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Strategi yang diterapkan adalah melakukan pengembangan sistem informasi terpadu dalam peningkatan pelayanan publik. Namun demikian masih diperlukan regulasi yang mengatur pengembangan sistem informasi sebagai acuan dasar dalam perencanaan integrasi sistem informasi.

Beberapa Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi adalah “Kebijakan Pemerintah dalam rangka pelayanan berbasis sistem elektronik membuka pintu integrasi antar aplikasi dan data yang saling mendukung pelayanan sehingga integrasi aplikasi dan data menjadi suatu kebutuhan yang mendapatkan perhatian serta kesadaran Perangkat Daerah akan keamanan dan kemudahan sistem informasi yang saling terintegrasi dalam proses pelayanan dan proses bisnis internal”.

- g. *Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal* tercapai 100%. Capaian ini didukung dengan adanya sistem keamanan informasi yang diterapkan. Dari 105 sistem informasi yang ada di Pemerintah kabupaten Temanggung terdapat 82 sistem informasi yang masuk kategori berfungsi optimal.

Faktor pendorong capaian indikator ini salah satunya adalah “Tercukupinya infrastruktur TIK di data center serta pengelolaan domain dan subdomain Pemerintah Kabupaten Temanggung secara mandiri mendorong pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan data, sistem dan informasi secara berkala”.

- h. *Cakupan Ketersediaan Data Makro Daerah* tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi 100%.

Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah sinergitas kerja sama Dinkominfo, Bappeda, BPS Temanggung serta Produsen Data yang berasal dari OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung yang merupakan elemen penyelenggara Satu Data Indonesia kabupaten Temanggung. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diatas adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPS Kabupaten Temanggung selaku pemegang kewenangan pelaksanaan statistik dasar dilingkup Kabupaten Temanggung.

- i. *Tingkat Kesiapan Penilaian/Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi* tercapai 100%. Capaian ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Strategi yang dilakukan guna kelancaran dan pencapaian kinerja program ini dengan melakukan kerja sama dengan BSSN dan Dinas Kominfo Jateng dalam melaksanakan IT Security Assesment dengan target 1 aplikasi yang diassesment setiap tahunnya, sehingga aplikasi-aplikasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat terpantau apabila ada lubang-lubang keamanan yang dapat dimasuki oleh pihak yang tidak berkepentingan.

3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 100%;
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tercapai 100%;
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tercapai 100%;
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 100%;
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 100%;

- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tercapai 100%;
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu tercapai 100%;
  - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tercapai 100%;
  - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tercapai 100%;
  - j. Pengelolaan Media Komunikasi Publik tercapai 100%;
  - k. Pelayanan Informasi Publik tercapai 100%;
  - l. Layanan Hubungan Media tercapai 100%;
  - m. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik tercapai 100%;
  - n. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah tercapai 100%;
  - o. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah tercapai 100%;
  - p. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik tercapai 100%.
  - q. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas tercapai 100%;
  - r. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah tercapai 100%;
  - s. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah tercapai 100%; dan
  - t. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%.
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
- a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 tidak tercapai 100%, dari target nilai yang ditetapkan sebesar 3,00 hanya terealisasi 2,80 atau hanya tercapai 93,33%, namun demikian capaian tersebut masih dalam predikat BAIK. Faktor-faktor yang menghambat capaian tersebut diantaranya adalah “belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan karena dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda serta dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung yang belum optimal”.

6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada.
7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mendapat predikat AA. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis yaitu “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*” dengan capaian kinerja 96,67%, dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Dari Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Triwulan I Tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo**

### **2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan I Tahun 2024  
Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Indikator Kinerja Utama:</b>												
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	97,38	89,95	90,15	90,35	97,38			100	T		
2	Indeks SPBE	Angka	2,8	3,2	3,35	3,5	2,8			87,5		AT	
	<b>Indikator Kinerja Program:</b>												
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	30	35	40	45	79,00			100	T		
2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	100	100	100	32,60			32,60		AT	
3	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	80	85	90	100	100			100	T		
4	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	100	100	100	98,55			98,55		AT	
5	Persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	50	55	60	29,01			58,02		AT	
6	Ketersediaan data statistik sektoral	%	62	73,93	73,97	74,01	97,83			100	T		
7	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	n.a	33,3	66,7	100	31,50			94,58		AT	
8	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	n.a	30	60	100	33,33			100	T		

Penjelasan untuk masing masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Program dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
  - a. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan kepada lembaga binaan dan mitra Dinkominfo; serta Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Masih minimnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berperan aktif dalam penyebaran informasi dan perlunya intervensi dan pendampingan kepada lembaga binaan dan mitra dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan bimbingan kepada lembaga binaan dan mitra Dinkominfo melalui sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan SDM dan pendekatan persuasif.
  - b. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Penyampaian konten informasi, terutama kebijakan dan program pemerintah yang telah berjalan sesuai target, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas. Hal ini didasari oleh berjalannya prosedur produksi dan upload konten, serta adanya sinergitas dengan instansi vertikal dan Forum Jurnalis Temanggung.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; kurang responsifnya jawaban dan tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang mendapatkan aduan dari masyarakat.
    - 3) Rekomendasi yang harus ditindak lanjuti adalah; Membuat kebijakan dengan menyusun Peraturan Bupati tentang batas waktu respon aduan *Mean Time To Respons* (MTTR) dan konsekuensi apabila melebihi batas

waktu.

c. Ketersediaan data statistik sektoral

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersediaan data di tiap OPD serta data statistik dasar merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh BPS sehingga data ini akan selalu update setiap tahunnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Data tersebut dihasilkan melalui kegiatan statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS Kabupaten Temanggung, sehingga ketersediaannya menunggu rilis data dari instansi tersebut.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan komunikasi secara masif dengan produsen data dan Pembinaan penjadwalan kegiatan pengumpulan data statistik.

d. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; SDM Keamanan informasi yang sudah dibekali dengan kemampuan untuk melaksanakan VA.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Kerentanan keamanan informasi yang selalu berkembang mengikuti perkembangan TI.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Mengupdate Kemampuan SDM dan Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan VA.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 terdiri dari:

a. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Penyampaian konten informasi, terutama kebijakan dan program pemerintah telah berjalan sesuai target, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut lebih cenderung ke sisi teknis, dan infrastruktur pendukung media, alat peliputan, fasilitas pemrosesan dan sarana produksi.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Optimalisasi dan upaya produksi variasi konten, serta penyebarluasan melalui media-media informasi yang menjadi favorit masyarakat.
- b. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Ketercukupan bandwidth dan tersedianya jaringan FO ke beberapa OPD.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut karena jaringan FO belum mengcover semua OPD dan peralatan jaringan radio mudah rusak/mati karena faktor alam ditambah lagi penggunaan VPN pada masing-masing jaringan di desa tidak terhubung secara fisik sehingga membutuhkan waktu dan tenaga teknis.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD.
- c. Persentase layanan publik secara elektronik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya layanan publik secara elektronik di semua OPD yang menyelenggarakan layanan publik dan tersedianya infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Permohonan pembuatan aplikasi diluar layanan publik dan dilaksanakan mendadak karena kebutuhan pimpinan dan kurangnya kesadaran dari OPD yang menyelenggarakan layanan publik untuk melaksanakan digitalisasi layanan publik Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melaksanakan prioritas pengembangan dan pembuatan aplikasi sesuai dengan permohonan dari OPD, dan memberikan pemahaman kepada OPD tentang pentingnya penyelenggaraan layanan publik secara elektronik.

- d. Persentase penilaian resiko keamanan informasi
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Meningkatnya kemampuan SDM pengelola keamanan informasi serta sinergitas antar OPD dalam mengamankan informasi dengan terbentuknya temanggungkab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*).
  - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Jumlah area untuk penilaian Indeks KAMI tiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dan kurangnya bukti dukung di tiap area penilaian.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Badan Siber dan Sandi Negara dan menambah kemampuan SDM teknis.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada.

### 2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data Makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Indikator Makro Daerah

##### a. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	Nilai (Ribu Rp.)	Pertumbuhan (%)
2020	27.702,75	-1,21
2021	28.484,02	2,82
2022	30.925,80	8,57
2023	33.433,54	8,10
2024 *	33.433,54	8,10

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung secara umum selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2021 pendapatan per kapita mengalami peningkatan namun masih sangat rendah yaitu di angka 2,82. Secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik, namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh penduduk Kabupaten Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Temanggung.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase atau jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu populasi atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

Rumus untuk menghitung angka kemiskinan dalam suatu populasi atau negara adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Kemiskinan} = \frac{\text{Jml Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Tabel 2.5  
Angka Kemiskinan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Angka Kemiskinan		
		Temanggung	Jateng	Nasional
1	2020	9,96	11,84	10,19
2	2021	10,17	11,79	9,71
3	2022	9,33	10,93	9,57
4	2023	9,26	10,77	9,36
5	2024 *	9,26	10,77	9,36

\*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan secara nasional. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu di angka 9,26 di tahun 2023, lebih rendah 0,1 persen dibandingkan angka kemiskinan Nasional.

c. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 2.6  
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di  
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	40% Bawah	17,54	18,78	18,46	19,52	19,52
2	40% Tengah	36,86	35,54	36,34	36,64	36,64
3	20% Atas	45,60	45,68	45,19	44,84	44,84

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

\*Data tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023

Data Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Kabupaten Temanggung tahun 2024 masih sama dengan 2023. Berdasarkan data pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 19,52. Dari angka tersebut bisa dilihat bahwa di Kabupaten Temanggung ketimpangan pengeluaran rendah karena porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Rumus untuk menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Temanggung dari Tahun 2020-2024

Tahun	TPT (%)	TPT Jateng	TPT Nasional
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,83
2023	2,32	5,24	5,45
2024 *	2,32	5,24	5,45

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

\*Data tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023

Dari tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung tahun 2023 di angka 2,32 yang berarti bahwa diantara 100 penduduk di Kabupaten Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan data tahunan dan menggunakan data n-1 sebagai dasar perhitungannya, sehingga data pokok triwulan I tahun 2024 nilainya sama dengan data angka TPT di akhir tahun 2023.

## 2. Indikator Sasaran Daerah

### a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Manajemen SPBE; dan 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8  
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	*2024
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,61	2,78	3,12	2,80	2,80

Sumber: Dinkominfo Kab.Temanggung 2024

\*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Triwulan I tahun 2024 masih menggunakan angka capaian tahun 2023 yaitu diangka 2,80, Meskipun capaian ini belum mendapati nilai tinggi, dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Tabel 2.10  
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
<b>Pemerintah Kab. Temanggung</b>		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
<b>Indeks SPBE</b>	:	<b>2.8</b>
<b>Predikat SPBE</b>	:	<b>Baik</b>
<b>Nilai Indeks</b>		
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	:	<b>3.3</b>
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.3
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	:	<b>2.2</b>
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25
Penyelenggara SPBE	:	2
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	:	<b>1</b>
Penerapan Manajemen SPBE	:	1
Audit TIK	:	1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	:	<b>3.63</b>
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3.83

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada *Domain Manajemen* mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain, hal ini menyebabkan nilai indeks SPBE menjadi rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Penerapan Manajemen Data;
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK;
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan;
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara faktual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK. Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Pemeringkatan keterbukaan badan publik ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait Keterbukaan Informasi Publik juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (Self Assesment Qessionaire).
- 2) Visitasi Verifikasi  
 Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.
- 3) Uji Publik  
 Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.
- 4) Penilaian Akhir  
 Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai.

Tabel 2.11  
 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten  
 Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2020	2021	2022	2023	*2024
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,50	89,56	88,33	97,38	97,38
	Kategori	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

*Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2024*

*\*Data tahun 2024 masih sama dengan data tahun 2023*

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat, bahwa pada tahun 2023 nilai KIP Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 97,38 dengan kategori Informatif. Ini merupakan capaian terbaik PPID Pemkab Temanggung dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012.

Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PPID, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pembantu, pengembangan *website* dan *dashboard* PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya perbaikan kedepan, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor Pendorong
  - a) Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID Pemkab Temanggung;
  - b) Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur.
- 2) Faktor Penghambat
  - a) Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi;
  - b) Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian.
- 3) Upaya Kedepan
  - a) Melakukan bimbingan kepada PPID Pelaksana melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.
  - b) Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaanya masih rendah.

Gambar 2.1 merupakan piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, dan Gambar 2.2 merupakan berita prestasi PPID Pemkab Temanggung.



Gambar 2.1  
Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 2.2  
Berita PPID Pemkab Temanggung Berhasil Raih Kategori Informatif

### 3. Indikator Program Dinkominfo

- a. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Dinkominfo memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan,

pemberdayaan, dan optimalisasi diseminasi informasi dengan lembaga binaan tersebut.

Lembaga binaan tersebut meliputi Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Saka Milenial, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), dan Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK), dengan rincian jumlah total lembaga binaan Dinkominfo, sebagai berikut:

- 1) Lembaga Penyiaran; yang terdiri:
  - a) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
  - b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)
- 2) FK Metra;
- 3) Relawan TIK;
- 4) Saka Milenial;
- 5) ORARI;
- 6) RAPI; dan
- 7) KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

Rumus untuk menghitung persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif adalah; Jumlah lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif dibagi Jumlah total lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo dikali 100%.

Tabel 2.12  
Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang aktif

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	na	na	na	na	83
2	Jumlah total lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo	na	na	na	na	102
	Persentase	na	na	na	na	81,37

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2024 nilai persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif yang merupakan indikator program tahun pertama Renstra 2024-2026 mencapai 100 persen, angka ini ditunjang oleh keaktifan Lembaga Penyiaran, FK Metra, Saka Milenial, RTIK, ORARI dan RAPI. Adapun untuk KIM belum seluruhnya aktif, disamping masih adanya pembentukan KIM-KIM baru dengan berlatarbelakang hobi/interest dan kewilayahan (KIM Desa).

Tabel 2.13  
Keaktifan Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi  
Informasi Dinkominfo

No	Nama Lembaga	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Lembaga Penyiaran	7	7	0
2	FK Metra	1	1	0
3	Relawan TIK	1	1	0
4	Saka Milenia	1	1	0
5	Orari	1	1	0
6	Rapi	1	1	0
7	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	90	71	19
	Jumlah	102	83	19

Tabel 2.14  
Lembaga Penyiaran Kabupaten Temanggung

No	Nama	Aktif	Tidak Aktif
1	LPPL Radio Temanggung (eRTe FM)	v	
2	LPPL Temanggung TV	v	
3	Radio Angkasa 7	v	
4	Radio OFA	v	
5	Radio O2	v	
6	Radio Santika		V
7	POP FM Parakan	v	
	Jumlah	6	1

Tabel 2.15  
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten  
Temanggung

No.	Nama Kim	Alamat	Tahun Pembentukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	✓	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017	✓	
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	✓	
4	Sari Makmur	Desa Campursari Kec. Bulu	2017		✓
5	Sebid	Desa Putat Kec. Bulu	2017		✓
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		✓
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017		✓
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		✓
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017	✓	
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017	✓	
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		✓
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		✓
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017	✓	
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		✓
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017	✓	
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017	✓	
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		✓
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017	✓	
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017		✓
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		✓
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018		✓
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018	✓	
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018		✓
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	✓	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018	✓	
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		✓
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018	✓	
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018		✓

No.	Nama Kim	Alamat	Tahun Pembe ntukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018	✓	
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018	✓	
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018	✓	
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018		✓
33	Campurejo Digdaya	Desa Campurejo Kec. Tretep	2022	✓	
34	Notif	Desa Tretep Kec. Tretep	2022		✓
35	Tlogo Wangi	Desa Tlogo Kec. Tretep	2022	✓	
36	Bojong Sejahtera	Desa Bojong Kec. Tretep	2022	✓	
37	KIM Desa Bendungan	Desa Bendungan Kec. Tretep	2022	✓	
38	Bonjor Bersinar	Desa Bojor Kec. Tretep	2022		✓
39	Abhi Praya	Desa Simpar Kec. Tretep	2022		✓
40	Nglarangan Andalan	Desa Nglarangan Kec. Tretep	2022	✓	
41	Raharjo	Desa Sigedong Kec. Tretep	2022	✓	
42	Tempelsari Bangkit	Desa Tempelsari Kec. Tretep	2022	✓	
43	Donorojo Maju	Desa Donorojo Kec. Tretep	2022		✓
44	Pamitran	Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo	2022	✓	
45	-	Desa Wates Kec. Wonoboyo	2022		✓
46	KIM Pateken	Desa Pateken Kec. Wonoboyo	2022	✓	
47	Rejo Mandiri	Desa Rejosari Kec. Wonoboyo	2022	✓	
48	Semoetgatel	Desa Tening Kec. Wonoboyo	2022	✓	
49	-	Desa Wonocoyo Kec. Wonoboyo	2022		✓
50	Tawangsari Berdaulat	Desa Tawangsari Kec. Wonoboyo	2022		✓
51	Mandiri	Desa Wonoboyo Kec. Wonoboyo	2022	✓	
52	Ndeso Adem	Desa Kebonsari Kec. Wonoboyo	2022		✓
53	-	Desa Cemoro Kec. Wonoboyo	2022	✓	
54	Mandiri	Desa Purwosari Kec. Wonoboyo	2022		✓
55	Bangun Jiwo	Desa Pesantren Kec. Wonoboyo	2022		✓
56	Parikesit	Desa Semen Kec. Wonoboyo	2022	✓	
57	Langgeng Gumregah	Desa Langgeng Kec. Tlogomulyo	2023	✓	
59	Jaya Mandiri	Desa Losari Kec.Tlogomulyo	2023	✓	
59	Kebondalem Lugas	Desa Kebondalem Kec.Bejen	2023	✓	

No.	Nama Kim	Alamat	Tahun Pembe ntukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
60	Menggora Jaya	Desa Menggora Kec. Tembarak	2023	✓	
61	Barokah	Desa Purwodadi Kec. Temarak	2023	✓	
62	BLITZ	Desa Banjarsari Kec. Ngadirjo	2023	✓	
63	Kataan		2023	✓	
64	Pringsurat	Desa Pringsurat Kec. Pringsurat	2023	✓	
65	Berdaya	Desa Kebuman Ke. Pringsurat	2023	✓	
66	Kopen	Desa Kopen Kec. Pringsurat	2023	✓	
67	Bangkit	Desa Karangwuni Kec.Pringsurat	2023	✓	
68	Gowak	Desa Gowak Kec. Pringsurat	2023	✓	
69	Bangkit	Desa Rejosari Kec.Pringsurat	2023	✓	
70	Ngipik Bersatu	Desa Ngipik Kec. Pringsurat	2023	✓	
71	Kokoh Mandiri	Desa Pingit Kec.Pringsurat	2023	✓	
72	Wonokerso Hebat	Desa Wonokerso Kec.Pringsurat	2023	✓	
73	Tegowanuh Jaya	Desa Twgowanuh Kec. Kaloran	2023	✓	
74	Pengayoman	Kel.Temanggung II Kec.Tmg	2023	✓	
75	JOTEC	Desa Joho Kec.Tmg	2023	✓	
76	“NN”	Desa Nampirejo Kec.Tmg	2023	✓	
77	Lentera Jurang	Kel.Jurang Kec.Tmg	2023	✓	
78	Madukismo	Kel.Madureso Kec.Tmg	2023	✓	
79	Manding Kreatif	Kel.Manding Kec.Tmg	2023	✓	
80	Purworwoj Kreatif	Kel.Purworejo Kec.Tmg	2023	✓	
81	e- pawartos	Kel.Walitelon Utara Kec.Temanggung	2023	✓	
82	Berdikari	Desa Candimulyo Kec.Kedu	2023	✓	
83	Berbudi Luhur	Desa Danurejo Kec.Kedu	2023	✓	
84	Berisik	Desa Gondangwayang Kec.Kedu	2023	✓	
85	Karangtejo Update	Desa Karangtejo Kec.Kedu	2023	✓	
86	Cerdas	Desa Kutoanyar Kec.Kedu	2023	✓	
87	Berseri	Desa Mergowati Kec. Kedu	2023	✓	
88	Berdikari	Desa Mojotengah Kec. Kedu	2023	✓	
89	Mandiri	Desa Bojonegoro Kec. Kedu	2023	✓	

No.	Nama Kim	Alamat	Tahun Pembentukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
90	KEDU	Desa Kedu Kec.Kedu	2023	✓	
Jumlah				71	19

b. Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

Diseminasi informasi merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah dengan seluruh unsurnya dengan melibatkan seluruh kanal komunikasi dan media yang dikelola. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/KOMINFO/03/2009 yang menyatakan bahwa diseminasi informasi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integritas (persatuan dan kesatuan) nasional.

Adapun arah dari diseminasi informasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi. Diseminasi informasi juga untuk memenuhi hak publik/masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat dan mudah diakses.

Dinkominfo sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan diseminasi informasi mengelola media dan kanal komunikasi publik, yaitu Media Komunikasi Resmi Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, Media Sosial, Videotron, Baliho Luar Ruang) serta LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung.

Adapun persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik didapatkan dengan rumus: Jumlah konten diseminasi informasi yang terealisasi dibagi Jumlah total konten diseminasi informasi yang ditargetkan dikali 100% (total target konten dalam satu tahun yaitu 1.460 konten)

Tabel 2.16  
 Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi  
 Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik  
 Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah konten diseminasi informasi yang disampaikan	na	na	na	na	604
2	Jumlah target konten diseminasi informasi yang disampaikan	na	na	na	na	1460
	Persentase	na	na	na	na	41,37

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Program Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai 32,60%. Capaian ini mengukur pada sifat konten publikasi dan informasi yang diupdate, mengikuti perkembangan isu, kejadian dan kebijakan yang ada pada tahun 2024 ini.

Tabel 2.17  
 Konten Diseminasi Informasi Media dan kanal  
 Komunikasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Kanal Media	Target Konten	Realisasi	Persentase
1	Media Elektronik	1390	469	32,12
2	Media Non elektronik	70	7	00,5
	Jumlah	1460	476	32,6

- c. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo  
 Dinkominfo menjadi lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memfasilitasi layanan pelaporan dan aduan dari masyarakat, berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74

Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 337/166 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Short Message Service (SMS) Gateway dan Whatsapp (WA) Gateway Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo, didapatkan dengan rumus: Jumlah laporan dan aduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah total laporan dan aduan dikali 100%.

Tabel 2.18

Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah laporan dan aduan yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	229
2	Jumlah total laporan dan aduan	n/a	n/a	n/a	n/a	229
	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%. Dari 229 laporan aduan masyarakat yang diajukan kepada Dinkominfo semua sudah ditindaklanjuti yaitu sejumlah 229 aduan.

Layanan aduan yang dikelola oleh Pemkab Temanggung adalah:

- 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N LAPOR! Aplikasi dari Pemerintah Pusat dikelola oleh MenPAN RB;

- 2) LaporGub Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah;
- 3) SMS Gateway dan Whatsapp Gateway (WAGE) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (sebagai super admin) dan Perangkat Daerah (sebagai admin).

Laporan dan dan aduan media sosial yang dikelola Pemkab Temanggung @pemkabtmg; @temanggungmediacenter; @kominfotmg, dan akun2 resmi media sosial yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Tabel 2.19  
Rekapitulasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan Masyarakat Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Media Layanan Aduan	Jumlah Aduan	Aduan Selesai	Persentase
1	SP4N lapor	5	5	100%
2	LaporGub	42	42	100%
3	SMS Gateway & Whatsapps Gateway (Wage)	187	187	100%
	Jumlah	229	229	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%. Dari 229 laporan aduan masyarakat yang diajukan kepada Dinkominfo semua sudah ditindaklanjuti yaitu sejumlah 229 aduan.

d. Persentase Kinerja infrastruktur TIK yang baik

Di tengah arus modernisasi dan transformasi digital yang melanda dunia saat ini, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan sebuah wilayah, tak terkecuali Kabupaten Temanggung. Sebagai sebuah entitas pemerintahan yang progresif, pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengarahkan perhatiannya pada pengembangan infrastruktur TIK yang berkualitas dan responsif. Dengan kesadaran akan pentingnya konektivitas digital dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, baik dalam

pelayanan publik maupun sektor ekonomi lokal, upaya pembangunan infrastruktur TIK yang baik menjadi sebuah prioritas yang tak terelakkan.

Kinerja infrastruktur TIK yang baik di Kabupaten Temanggung tercermin melalui berbagai indikator, mulai dari ketersediaan akses internet yang luas dan cepat hingga integrasi sistem informasi yang efisien dalam proses administratif pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, pemerintah Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan akses informasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha dan inovasi.

Angka presentasi kinerja infrastruktur TIK yang baik diperoleh dari rumus jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai dibagi dengan jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2024 Triwulan I disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.20  
Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik di Kab. Temanggung Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai	n/a	n/a	n/a	n/a	60
2	Jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK	n/a	n/a	n/a	n/a	60
	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sudah terkoneksi mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya n.a itu dikarenakan Indikator diatas merupakan indikator baru.

Faktor pendorong ketercapaian indikator kinerja infrastruktur TIK yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 2) Telah tersedianya Infrastruktur TIK berupa jaringan fiber optic dan jaringan radio (antena) untuk mengkoneksikan Jaringan internet ke OPD (Dinas, Kecamatan dan kelurahan) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- 1) Perangkat kedaluwarsa atau tidak tergantikan yaitu peralatan jaringan yang sudah usang atau tidak lagi didukung oleh produsen dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terganggu jika terjadi kerusakan pada peralatan tersebut yang sudah tidak di produksi lagi oleh produsen atau pabrik (discontinue).
- 2) Kerusakan fisik atau gangguan infrastruktur fisik seperti peralatan repeater pada tower rentan terhadap kerusakan fisik akibat faktor alam seperti terkena petir karena memang beberapa tempat daerah rawan petir.

Tabel 2.21

Data Jumlah OPD yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Uraian	2024	Terkoneksi Jaringan Dinkominfo	Kondisi	
				Aktif	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	26	26	26	-
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	-
3	Jumlah Kelurahan	23	23	23	-
JUMLAH		69	69	69	-

Tabel 2.22  
Data Kantor/Badan/Dinas yang terfasilitasi Infrastruktur  
TIK dari Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2024

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Dinas Perhubungan	√	
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	√	
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	
4	Dinas Kesehatan	√	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	√	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	
8	DPRD Temanggung	√	
9	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	√	
10	Dinas Sosial	√	
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	√	
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√	
13	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	√	
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	√	
15	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD Djoyonegoro)	√	
16	Dinas Tenaga Kerja	√	
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	√	
18	Dinas Lingkungan Hidup	√	
19	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	√	
20	Sekretariat Daerah	√	
21	Inspektorat	√	
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	√	
25	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	√	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	
Jumlah		26	-

Tabel 2.23  
Data Kecamatan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari  
Dinkominfo Tahun 2024

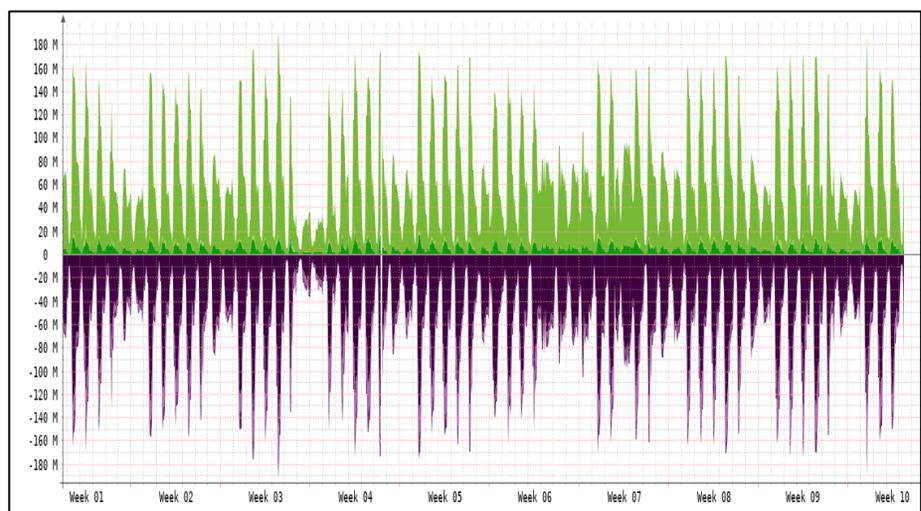
No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kecamatan Temanggung	√	
2	Kecamatan Pringsurat	√	
3	Kecamatan Kranggan	√	
4	Kecamatan Selopampang	√	
5	Kecamatan Tembarak	√	
6	Kecamatan Tlogomulyo	√	
7	Kecamatan Bulu	√	
8	Kecamatan Kedu	√	
9	Kecamatan Kaloran	√	
10	Kecamatan Kandangan	√	
11	Kecamatan Jumo	√	
12	Kecamatan Gemawang	√	
13	Kecamatan Bansari	√	
14	Kecamatan Kledung	√	
15	Kecamatan Ngadirejo	√	
16	Kecamatan Candioto	√	
17	Kecamatan Wonobojo	√	
18	Kecamatan Tretep	√	
19	Kecamatan Bejen	√	
20	Kecamatan Parakan	√	
Jumlah		20	-

Tabel 2.24  
Data Kelurahan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari  
Dinkominfo Tahun 2024

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kelurahan Kranggan	√	
2	Kelurahan Manggong	√	
3	Kelurahan Parakan Kauman	√	
4	Kelurahan Parakan Wetan	√	
5	Kelurahan Banyuurip	√	
6	Kelurahan Temanggung I	√	
7	Kelurahan Temanggung II	√	
8	Kelurahan Butuh	√	
9	Kelurahan Jampirejo	√	
10	Kelurahan Jampiroso	√	
11	Kelurahan Kertosari	√	

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
12	Kelurahan Kowangan	√	
13	Kelurahan Sidorejo	√	
14	Kelurahan Jurang	√	
15	Kelurahan Kebonsari	√	
16	Kelurahan Manding	√	
17	Kelurahan Mungseng	√	
18	Kelurahan Giyanti	√	
19	Kelurahan Purworejo	√	
20	Kelurahan Madureso	√	
21	Kelurahan Tlogorejo	√	
22	Kelurahan Walitelon Selatan	√	
23	Kelurahan Walitelon Utara	√	
Jumlah		23	-

Dari tabel data dukung diatas terdapat satu kelurahan walitelon utara yang status infrastruktur jaringan internetnya down dikarenakan terdapat peralatan antena yang rusak dan belum ada penggantinya karena alat tersebut sudah *discontinue* atau tidak di produksi dari pabrik lagi. Jika mengganti peralatan dengan merk/tipe berbeda maka koneksi tidak bisa dilakukan karena karakteristik alat saat dikoneksi tidak mendukung, sehingga jika mau diganti dengan alat yang berbeda jaringan backbone yang menuju Kelurahan Walitelon juga harus dirubah.



Gambar 2.3  
Grafik koneksi internet di OPD



Gambar 2.4  
Grafik koneksi internet di Kecamatan



Gambar 2.5  
Grafik koneksi internet di Kelurahan

e. Persentase layanan publik secara elektronik

Layanan publik adalah segala jenis pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Layanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Layanan publik dapat berupa penyediaan fasilitas, program-program pemerintah, atau pengaturan berbagai kegiatan untuk memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi. Dalam banyak kasus, layanan publik juga mencakup kegiatan pengawasan dan pengaturan untuk memastikan bahwa layanan tersebut

disediakan dengan standar yang sesuai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Layanan publik elektronik adalah layanan publik yang disediakan secara elektronik melalui platform digital, seperti internet atau aplikasi mobile. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan aksesibilitas yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

Layanan publik elektronik memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Aksesibilitas yang lebih baik: Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dari mana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet.
- 2) Efisiensi: Proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
- 3) Transparansi: Informasi mengenai layanan publik dapat disajikan secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk memahami proses dan persyaratan yang dibutuhkan dengan lebih baik.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat: Dengan memudahkan akses dan proses penggunaan, layanan publik elektronik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Namun, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya, layanan publik elektronik juga perlu memperhatikan keamanan data pribadi, aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi, serta dukungan teknis yang memadai.

Adapun untuk menentukan persentase layanan public elektronik dengan rumus jumlah layanan publik elektronik dibagi jumlah layanan publik yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.25  
 Persentase Layanan Publik Secara Elektronik Kabupaten  
 Temanggung sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah layanan publik elektronik	na	na	na	na	41
2	Jumlah layanan publik yang ditetapkan	na	na	na	na	131
	Persentase	na	na	na	na	31,30

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2024 sudah dilaksanakan proses layanan publik secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 tercatat ada 41 layanan publik yang sudah menerapkan system elektronik atau sebesar 31,30% dari jumlah layanan yang ditetapkan sebanyak 131 layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.26  
 Daftar Layanan Publik Yang Ditetapkan

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat DPRD
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPTSP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH
7	Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Tani	DKPP
8	Fasilitasi Penentuan Calon Lokasi Penanaman Bawang Putih bagi Importir Bawang Putih	DKPP
9	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
10	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	DKPP
11	Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti Pasar Ikan Dangkel	DKPP
12	Penyewaan Guesthouse	DKPP
13	Penyewaan Mess / Penginapan	DKPP
14	Penyewaan Los Benih Ikan	DKPP

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
15	Penyewaan Los Ikan Konsumsi	DKPP
16	Penyewaan Kios	DKPP
17	Penjualan Ikan	DKPP
18	Bimbingan Teknis Perikanan	DKPP
19	Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak	DKPP
20	Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH	DKPP
21	Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan	DKPP
22	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Rabies)	DKPP
23	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza);	DKPP
24	Jasa Pemoangan Hewan	DKPP
25	Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP
26	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	DKPP
27	Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan	DKPP
28	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)	DKPP
29	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)	DKPP
30	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
31	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama	DKPP
32	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Klinik Hewan	DKPP
33	Rekomendasai Ijin tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah sakit Hewan	DKPP
34	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
35	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Warga Negara Asing	DKPP
36	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner	DKPP
37	Rekomendasi Ijin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
38	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop.	DKPP
39	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di toko Hewan	DKPP
40	Rekomendasi Izin Usaha Pemeotongan Hewan Ruminasia	DKPP
41	Rekomendasi Izin Usaha Pematongan Unggas	DKPP
42	Rekomendasi Izin Jagal	DKPP
43	Rekomendasi Izin Menjual Daging	DKPP
44	Rekomendasi Izin Usaha Pemerahan Susu	DKPP
45	Rekomendasi Izin Menjual Susu Segar	DKPP
46	Rekomendasi Izin Usaha Produk Telur Unggas Konsumsi	DKPP
47	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan	DKPP
48	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan	DKPP
49	Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan	DKPP
50	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	DKPP
51	Rekomendasi Izin Usaha Pakan	DKPP
52	Rekomendasi Izin Perluasan Usaha Peternakan	DKPP
53	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
54	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
55	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
56	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK
57	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
58	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
59	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;	DKK
60	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Perawat;	DKK
61	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	DKK
62	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Bidan;	DKK
63	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Apoteker;	DKK

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
64	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	DKK
65	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;	DKK
66	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	DKK
67	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Radiografer;	DKK
68	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Fisioterapis;	DKK
69	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Elektromedik;	DKK
70	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Okupasi Terapi;	DKK
71	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Terapis Wicara;	DKK
72	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien;	DKK
73	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Perekam Medis;	DKK
74	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	DKK
75	Rekomendasi Izin Pelayanan Kerja Tenaga Gizi;	DKK
76	Pelayanan Perizinan Depot Air Minum;	DKK
77	Pelayanan Perizinan Jasa Boga;	DKK
78	Pelayanan Pendaftaran Penyehat Tradisional;	DKK
79	Pelayanan Rekomendasi Ambulans	DKK
80	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
81	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
82	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
83	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
84	Layanan PPID	Dinkominfo
85	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
86	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
87	Layanan PPDB	Dindikpora
88	Layanan Dapodik	Dindikpora
89	Layanan Kependudukan	Dindukcapil
90	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
91	Rawat Jalan	RSUD
92	Rawat Inap	RSUD
93	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
94	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
95	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
96	Layanan Sanka	Dinsos
97	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
98	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
99	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar
100	Tanda Daftar LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
101	Ijin Operasional LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
102	Rekomendasi Magang	Dinperinaker
103	Rekomendasi Pelatihan	Dinperinaker
104	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
105	Verifikasi CPMI	Dinperinaker
106	Pengesahan perjanjian penempatan CPMI	Dinperinaker
107	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinperinaker
108	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Dinperinaker
109	Fasilitasi Rekrutmen tenaga kerja	Dinperinaker
110	Layanan Bimbingan Jabatan dan Penyuluhan jabatan	Dinperinaker
111	Konseling bagi penerima JKP	Dinperinaker
112	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker
113	Fasilitasi Kasus Pekerja Migran	Dinperinaker
114	Unit Layanan Disabilitas	Dinperinaker
115	Pelayanan Pelatihan Produktivitas	Dinperinaker
116	Pelatihan industri	Dinperinaker
117	Fasilitasi Kemasan Fasilitasi pendaftaran merk	Dinperinaker
118	Rekomendasi keringan pendaftaran Merk	Dinperinaker
119	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
120	Pendampingan Pendaftaran	Dinperinaker
121	Pencatatan Serikat Pekerja	Dinperinaker
122	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Dinperinaker
123	Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinperinaker
124	Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	Dinperinaker
125	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial/Mediasi Kasus HI	Dinperinaker
126	Pendaftaran Perjanjian Jasa Pekerja	Dinperinaker
127	Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dinperinaker
128	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
129	Permohonan persetujuan KPR	DPUPR
130	Ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
131	Layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
Jumlah		131

Tabel 2.27  
Daftar Layanan Publik Secara Elektronik

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat DPRD
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPTSP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH
7	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
8	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
9	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
10	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
11	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK
12	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
13	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
14	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
15	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
16	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
17	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
18	Layanan PPID	Dinkominfo
19	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
20	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
21	Layanan PPDB	Dindikpora
22	Layanan Dapodik	Dindikpora
23	Layanan Kependudukan	Dindukcapil
24	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
25	Rawat Jalan	RSUD
26	Rawat Inap	RSUD
27	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
28	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
29	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
30	Layanan Sanka	Dinsos
31	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos
32	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
33	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar
34	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
35	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
36	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
37	Pendampingan Pendaftaran SIINAS (Aplikasi SIINAS Kemenperin)	Dinperinaker
38	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
39	permohonan persetujuan kpr	DPUPR
40	ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
41	layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
Jumlah		41

f. Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung Nomor: 050/004.1/2023 tentang Data Prioritas Statistik Sektoral, Standar Data, dan Metadata Kabupaten Temanggung tahun 2023 telah menetapkan daftar data prioritas statistik sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditetapkan 215 data prioritas statistik sektoral yang berasal dari 46 Produsen Data.

Rumus untuk menghitung Ketersediaan Data Statistik Sektoral sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \textit{Ketersediaan Data Statistik Sektoral} \\ & = \frac{\textit{Jumlah Data yang Dikelola}}{\textit{Jumlah Data Prioritas yang Ditetapkan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Dinkominfo Kabupaten Temanggung memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola data statistik sektoral. Saat ini terdapat 215 data prioritas yang bersumber dari 46 produsen data berbeda. Pengumpulan data ini dilakukan

tiga kali dalam setahun untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini.

Setelah data dikumpulkan, Dinkominfo mendiseminasikan informasi ini dalam berbagai bentuk untuk memudahkan akses publik. Ini termasuk distribusi dalam bentuk buku, soft copy, aplikasi Android, dan melalui laman [data.temanggungkab.go.id](http://data.temanggungkab.go.id). Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data yang relevan.

Buku Statistik Kabupaten Temanggung menerbitkan data statistik sektoral yang mencakup informasi dari tahun sebelumnya (n-1), sehingga masyarakat dapat melihat gambaran umum perkembangan wilayah. Sementara itu, laman [data.temanggungkab.go.id](http://data.temanggungkab.go.id) menyediakan data statistik tahun berjalan yang diperbarui setiap semester. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan terbaru dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat.

Tabel 2.28  
Ketersediaan Data Statistik Sektoral  
Sd. Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah data yang dikelola	na	na	na	na	215
2	Jumlah data prioritas yang ditetapkan	na	na	na	na	215
	Persentase	na	na	na	na	100

Dari table tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2023 ketersediaan data statistik sektoral mencapai 100%, yang berarti bahwa dari 215 data prioritas yang ditetapkan semua datanya sudah terbaharui dan tersedia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pembaruan data telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu sehingga kualitas dan keakuratan informasi yang tersedia bagi pengguna dapat dipertanggung-jawabkan.

Tabel 2.29  
Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
1	Jarak dari Kota Temanggung ke Berbagai Kota di Jawa Tengah Melalui Jalur Terdekat,	√		BPS
2	Suhu Udara Rata-rata, Maksimum dan Minimum (°C) Kabupaten Temanggung	√		BMKG Semarang
3	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Temanggung, -	√		BMKG Semarang
4	Luas Wilayah Kabupaten Temanggung Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut (Hektare)	√		BPS
5	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
6	Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
7	Luas Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
8	Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Temanggung,	√		BPS
9	Pembagian Wilayah Administrasi Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
10	Jumlah Prasarana Desa dan Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
11	Banyaknya Kegiatan dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		Sekretariat DPRD
12	Jumlah Persidangan DPRD Kabupaten Temanggung,	√		Sekretariat DPRD
13	Jumlah Persidangan Komisi DPRD Kabupaten Temanggung,	√		Sekretariat DPRD
14	Jumlah Keputusan (Produk) DPRD Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
15	Komposisi Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
16	Jumlah Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
17	Komposisi Anggota DPRD Menurut Fraksi dan Kelompok Umur, Kabupaten Temanggung	√		Sekretariat DPRD
18	Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,	√		Dindikcapil
19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
20	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun dan Kepemilikan Akta	√		Dindikcapil

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Kelahiran di Kabupaten Temanggung,			
21	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
22	Jumlah Penduduk WNA Menurut Jenis Kelamin, Dewasa dan Anak-anak dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
23	Angka Kelahiran Kasar (CBR) per 1000 Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
24	Angka Kematian Kasar (CDR) per 1000 Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
25	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
26	Banyaknya Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
27	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
28	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Mata Pencarian per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindukcapil
29	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin,	√		BKPSDM
30	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Golongan dan Jenis Kelamin,	√		BKPSDM
31	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Otonom di Lingkungan Pemerintah Kab.Temanggung Menurut Pendidikan yang Ditamatkan,	√		BKPSDM
32	Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri Menurut Tingkat Pendidikan,	√		Dinperinaker
33	Pencari Kerja Belum Berpengalaman yang Mendaftarkan Diri Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
34	Penempatan Kerja Asal Kabupaten Temanggung Menurut Antar Kerja,	√		Dinperinaker
35	Banyaknya Transmigran Asal Kabupaten Temanggung Menurut Provinsi Penempatan,	√		Dinperinaker
36	Realisasi Pemberangkatan Transmigran Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
37	Animo Transmigrasi Menurut Daerah Asal dan Jenis	√		Dinperinaker

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Transmigrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,			
38	Banyaknya Pelayanan Akte pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
39	Banyaknya Penduduk, Penduduk Wajib ber-KTP Elektronik dan Kepemilikan KTP Elektronik Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
40	Jumlah Kepala Keluarga Aktual dan Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
41	Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun dan Jumlah Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
42	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status kawin Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
43	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
44	Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dindikcapil
45	Banyaknya Sekolah dan Murid SD Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
46	Banyaknya Guru Sekolah Dasar Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
47	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid SD Menurut Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2020/	√		Dindikpora
48	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru SMP Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
49	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid SMP dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020/	√		Dindikpora
50	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora
51	Banyaknya Murid SD yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
52	Banyaknya Murid SMP yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
53	Banyaknya PAUD, Murid dan Guru Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
54	Nilai APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran /	√		Dindikpora
55	Banyaknya Perpustakaan Sekolah Menurut Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, /	√		Dindikpora
56	Banyaknya Tenaga Medis, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes
57	Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS menurut Kecamatan Dirinci Per Tri Wulan di Kab. Temanggung,	√		Dinkes
58	Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan PKD Menurut Kecamatan di Kab. Temanggung,	√		Dinkes
59	Banyaknya Pengunjung yang Berobat ke PUSKESMAS Menurut Jenis Pembayaran dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes
60	Banyaknya Posyandu Menurut Kategori dan Prevalensi Status Gizi Balita Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkes
61	Banyaknya Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan Dirinci Menurut Jenis Ketenagaan dan Status Pegawai di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
62	Penyakit Terbanyak yang Diderita Pasien Rawat Inap di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
63	Penyakit Terbanyak yang Diderita Pasien Rawat Jalan di Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
64	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan Dirinci Menurut Jenis Poliklinik Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
65	Nilai Indikator Pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Temanggung,	√		4 RS
66	Persediaan dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Bulan,	√		PMI
67	Banyaknya Penggunaan Darah Dirinci Menurut Bulan dan Bagian yang Menerima di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Temanggung,	√		PMI
68	Produksi dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Temanggung,	√		PMI
69	Realisasi Penyaluran Dana PMI Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Bulan,	√		PMI

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
70	Banyaknya Anggota dan Pembina PMR di Kabupaten Temanggung,	√		PMI
71	Realisasi Penyaluran Obat-obatan PMI Cab. Temanggung,	√		PMI
72	Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktip Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
73	Banyaknya Peserta KB Aktif yang Menggunakan Kontrasepsi MKJP di Kabupaten Temanggung Dirinci Menurut Kecamatan,	√		DPPPAPPKB
74	Peserta KB Aktif yang Menggunakan Kontrasepsi Non MKJP Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
75	Jumlah Sarana Tempat Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
76	Jumlah Pencapaian Akseptor Baru Dirinci Menurut Metode Kontrasepsi dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
77	Banyaknya Tenaga Lapangan BKBPP Dalam Operasional Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
78	Banyaknya Institusi Masyarakat (Pagubuyan KB) yang Mendukung Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
79	Banyaknya Kelompok Kegiatan Bina-Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Temanggung,	√		DPPPAPPKB
80	Banyaknya Pemeluk Agama Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
81	Banyaknya Tempat Ibadah Dirinci Menurut Jenis Tempat Ibadah dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
82	Jumlah Majelis Taklim, Muallim dan Jamaah Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
83	Banyaknya Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
84	Banyaknya Jama'ah Haji Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
85	Banyaknya Penduduk yang Menunaikan Ibadah Haji Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
86	Banyaknya Penduduk yang Menunaikan Ibadah Haji Dirinci Menurut Kelompok Umur dan	√		Kemenag

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Kecamatan di Kabupaten Temanggung,			
87	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
88	Banyaknya Guru Madrasah Ibtidaiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
89	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MI Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
90	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
91	Banyaknya Guru Madrasah Tsanawiyah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
92	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
93	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
94	Banyaknya Guru Madrasah Aliyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
95	Banyaknya Peserta Ujian dan Persentase Kelulusan Murid MA Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
96	Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Taman Kanak-kanak (RA) Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun /	√		Kemenag
97	Banyaknya Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
98	Banyaknya Guru Dosen di Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
99	Banyaknya Murid dan Mahasiswa di Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
100	Banyaknya Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
101	Banyaknya Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang Mengulang dan Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /	√		Kemenag
102	Banyaknya Murid Madrasah Aliyah (MA) yang Mengulang dan	√		Kemenag

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Putus Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran /			
103	Jumlah Pondok Pesantren dan Santri Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
104	Jumlah Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Jumlah Pengajar dan Jumlah Santri Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
105	Banyaknya Sekolah Diniyah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Kemenag
106	Banyaknya Perkara yang Masuk Dirinci Menurut Jenis Perkara di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
107	Banyaknya Perceraian Dirinci Menurut Bulan dan Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
108	Banyaknya Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
109	Jumlah Perkara Yang Diterima pada Pengadilan Agama Temanggung Kelas I.B Dirinci Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung ,	√		Pengadilan Agama
110	Jumlah Perkara yang Diputus pada Pengadilan Agama Kelas I.B Dirinci Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Agama
111	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Acara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
112	Jumlah Terdakwa yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Acara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
113	Jumlah Terdakwa /Terhukum yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan, Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri Di Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
114	Jumlah Terdakwa /Terhukum yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Sikap Terhadap Keputusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
115	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
116	Jenis Perkara Perdata yang Diterima dan Diputus Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
117	Proses Perkara Pidana yang Diterima dan Diputus Dirinci Menurut Bulan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
118	Perkara Pidana Ringan dan Lalu Lintas yang Diterima, Diputus dan Jumlah Denda Dirinci Menurut Bulan di Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung,	√		Pengadilan Negeri
119	Jumlah Tahanan dan Kapasitas Tempat Dirinci Menurut Bulan di Rumah Tahanan Kabupaten Temanggung,	√		Rumah Tahanan
120	Tambahan Narapidana Termasuk Pidana Kurungan Pengganti Denda Berdasarkan Keputusan Pengadilan Dirinci Menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung,	√		Rumah Tahanan
121	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Pelanggarana di Wilayah Kabupaten Temanggung,	√		Polres
122	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korbanya Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Korban di Wilayah Kabupaten Temanggung,	√		Polres
123	Jumlah Kejadian Tindak Pidana Yang dilaporkan Dirinci Menurut Kecamatan Dan jenis Kejahatan/Pelanggaran di Kepolisian Resort Temanggung,	√		Polres
124	Banyaknya Becana Alam, Kerugian dan Bantuan yang Diberikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
125	Banyaknya Becana Sosial, Kerugian dan Bantuan yang Diberikan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
126	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
127	Banyaknya Pekerja Sosial Masyarakat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinsos
128	Jumlah Mutasi Penerima Manfaat (Kelayan) di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
129	Banyaknya Penerima Manfaat (Kelayan) Menurut Jenis Kelamin di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG)"Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
130	Jumlah Penerima Manfaat (Kelayan)dan Instruktur/Pendamping Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
131	Jumlah Penerima Manfaat (Anak Negara) Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) "Kartini" Temanggung	√		Sentra Terpadu Kartini
132	Jumlah Penerima Manfaat di Dalam Lembaga Menurut Kelompok Umur di Sentra Terpadu Kartini	√		Sentra Terpadu Kartini
133	Jumlah Penerima Manfaat di Luar Lembaga Menurut Kelompok Umur di Sentra terpadu Kartini	√		Sentra Terpadu Kartini
134	Data Penerima Manfaat Tuna Netra di Balai Rehabilitasi Soaial "Penganthi" Temanggung	√		PPSDN "Penganthi"
135	Banyaknya Penerima Manfaat (Kelayan) Menurut Jenis Kelamin yang Disantuni di PTNTRW "Penganti" Temanggung	√		PPSDN "Penganthi"
136	Jumlah Penerima Manfaat dan Instruktur di Balai Rehabilitasi "Penganti" Temanggung,	√		PPSDN "Penganthi"
137	Banyaknya Swadaya Masyarakat Murni dan Pendukung Kegiatan Pembangunan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
138	Banyaknya LPMD / LPMK dan Pengurus Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinpermades
139	Banyaknya Sarana & Prasarana Persampahan Yang Berfungsi di Kabupaten Temanggung, -	√		DPRKPLH
140	Produksi Sampah Rata-rata per hari (M3) pada Daerah /kawasan Yang Terlayani di Kabupaten Temanggung	√		DPRKPLH
141	Frekuensi Kebakaran, Banyaknya Korban dan taksiran Kerugian di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
142	Banyaknya Bencana Kebakaran, yang Terbakar dan Kehilangan Tempat Tinggal di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
143	Banyaknya Bencana Kebakaran Dirinci Menurut Bulan Di Kabupaten Temanggung	√		Satpol PP dan Damkar
144	Hasil Analisa Kualitas Air Sungai dan Mata Air di kabupaten Temanggung,	√		DPRKPLH
145	Pengukuran Kualitas Udara Ambien Menurut Lokasi di Kabupaten Temanggung,	√		DPRKPLH
146	Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Padi dan Palawija Dirinci Menurut jenis Tanaman per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
147	Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
148	Jumlah Tanaman Buah-Buahan yang Menghasilkan dan Produksinya Menurut Kecamatan	√		DKPPP

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,			
149	Realisasi Kebutuhan Pupuk Untuk Sub Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
150	Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
151	Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmakan yang Menghasilkan Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
152	Luas Hutan Rakyat dan Lahan Kritis menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung, -	√		DKPPP
153	Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
154	Produksi Perhutani dan Hasil Hutan Lainnya Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Temanggung tahun -	√		Perum Perhutani
155	Luas Pangkuan Hutan Negara berdasarkan Resor Pengelolaan Hutan (RPH) dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Perum Perhutani
156	Populasi Ternak Besar Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
157	Populasi Ternak Kecil Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
158	Populasi Ternak Unggas Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
159	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
160	Perdagangan Ternak di Pasar Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
161	Hasil dan Nilai Produksi Ikan Kolam Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
162	Hasil dan Nilai Produksi Ikan Budidaya Mina Padi Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
163	Hasil Produksi Benih Ikan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
164	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Sungai Dirinci Menurut Kecamatan dan	√		DKPPP

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,			
165	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Genangan/Cek Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
166	Produksi dan Nilai Hasil Penangkapan Ikan di Jaring Apung Dirinci Menurut Jenis Ikan dan Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		DKPPP
167	Banyaknya Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Dirinci Menurut Klasifikasi Industri per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
168	Banyaknya Unit Usaha Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi Dirinci Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
169	Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Produk Industri Menurut Komoditas di Kabupaten Temanggung	√		Dinkopdag
170	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
171	Jenis, Jumlah dan Nilai Produksi Sektor Industri Menurut Jenis Industri di Kabupaten Temanggung,	√		Dinperinaker
172	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Wilayah PLN Rayon Temanggung	√		PLN Temanggung
173	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Wilayah PLN Rayon Parakan, -	√		PLN Parakan
174	Perkembangan Pelanggan Listrik Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung, -	√		PLN Temanggung dan Parakan
175	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Dirinci Menurut Bulan di Wilayah Cabang PLN Temanggung,	√		PLN Temanggung
176	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Dirinci Menurut Bulan di Wilayah Cabang PLN Parakan,	√		PLN Parakan
177	Perkembangan Pelanggan dan Daya VA Listrik di Wilayah Rayon PLN Temanggung,	√		PLN Temanggung dan Parakan
178	Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenisnya Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
179	Banyaknya Pelanggan Air yang disalurkan dan Nilainya Dirinci Menurut Kategori Pelanggan di Kabupaten temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
180	Banyaknya Mata Air yang Dikelola PDAM Kabupaten Temanggung, Dirinci per Kecamatan DiKabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
181	Banyaknya Penanganan Pengaduan Pelangan PDAM Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
182	Banyaknya Pengiriman Air dengan Mobil Tangki dan Nilainya Menurut Kategori Pengiriman di Kabupaten Temanggung,	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
183	Jumlah Penjualan Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Dirinci per Bulan pada SPBU di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
184	Capaian Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	√		Dinkopdag
185	Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Temanggung, 2020 -	√		DPUPR
186	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Dirinci per Bulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
187	Jumlah Rit Bis yang Masuk Terminal Dirinci per Bulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
188	Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
189	Jumlah Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinhub
190	Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Dirinci PerBulan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinbudpar
191	Pendapatan Obyek Wisata dari Karcis Masuk, Fasilitas danTempat Parkir di Kabupaten Temanggung,	√		Dinbudpar
192	Banyaknya Pengunjung Pikatan Water Park Temanggung Per Bulan di Kabupaten Temanggung	√		PD Bhumi Phala Wisata
193	Persentase Hunian Kamar, Rata-rata Lama Tamu Menginapdi Kabupaten Temanggung,	√		BPS
194	Banyaknya Pelanggan Telepon Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. Telkom
195	Banyaknya Kantor Pos Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
196	Banyaknya Pelanggan Telepon Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
197	Banyaknya Lalu Lintas Wesel Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
198	Banyaknya Lalu Lintas Pos Udara yang Dikirim dan Diterima dari Dalam dan Luar Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		PT. POS Indonesia
199	Banyaknya Lalu Lintas Paket Pos yang Dikirim dan Diterima dari Dalam dan Luar Negeri Menurut	√		PT. POS Indonesia

No	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	Kecamatan di Kabupaten Temanggung,			
200	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran	√		BPKPAD
201	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran	√		BPKPAD
202	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset daerah Kabupaten temanggung Dirinci per bulan,	√		UPPD
203	Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Ber motor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
204	Obyek Pajak Kendaraan Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
205	Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kab. Temanggung Dirinci per Bulan,	√		UPPD
206	Penerimaan Pajak Air Permukaan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Temanggung Dirinci Per Bulan,	√		UPPD
207	Hasil Penerimaan Pajak wilayah Kerja Kantor Pajak Pratama Kabupaten Temanggung,	√		KPP Pratama
208	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kabupaten Temanggung	√		KPP Pratama
209	Jumlah Koperasi, Anggota, Permodalan, Tenaga Kerja, SHU,Aset dan Volume Usaha Menurut Usahanya di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
210	Jumlah Koperasi, Anggota, Permodalan, Tenaga Kerja, SHU,Aset dan Volume Usaha Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
211	Banyaknya Pasar Daerah dan Pasar Desa Menurut Jenisnya Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
212	Rata-Rata Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Pasar Kabupaten Temanggung,	√		Dinkopdag
213	Rata-rata Harga Eceran Sayur-sayuran dan Bumbu-bumbuan Kabupaten Temanggung	√		Dinkopdag
214	Realisasi Investasi PMDB Menurut Sektor, -	√		DPM
215	Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selama Tahun	√		DPM

Dengan data statistik yang lengkap dan terbaru, pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, seperti pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum, dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia.

g. Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

Penilaian resiko keamanan informasi adalah indeks untuk mengukur kematangan dan kesiapan perangkat daerah dalam menanggulangi ancaman terhadap gangguan ataupun hambatan yang dapat mengganggu Keamanan Informasi di lingkup pemerintah daerah yang dalam penilaiannya menggunakan form ataupun tools yang disebut Indeks KAMI.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek kelengkapan maupun kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya. Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk

tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area sebagai berikut:

- 1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Informasi, dan
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi

Penggunaan Penggunaan aplikasi Indeks KAMI ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah daerah dan kemudian untuk verifikasi dari nilai yang didapatkan akan diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi yang berwenang untuk menilai tingkat Kematangan Keamanan Informasi tersebut.

Dari 6 area yang dinilai tersebut nantinya dapat dipetakan bahwa suatu daerah itu sudah termasuk kategori Tingkat 1 sampai dengan 4 dengan nilai maksimal 635 point untuk total semua area yang dinilai.

Untuk menentukan persentase indeks KAMI adalah dengan menghitung hasil nilai per area Indeks KAMI di Kabupaten Temanggung dibagi target indeks KAMI yang ditetapkan dikali 100%.

Penetapan target indeks KAMI Kabupaten Temanggung berdasarkan kondisi sarana prasarana keamanan informasi yang ada di Kabupaten Temanggung.

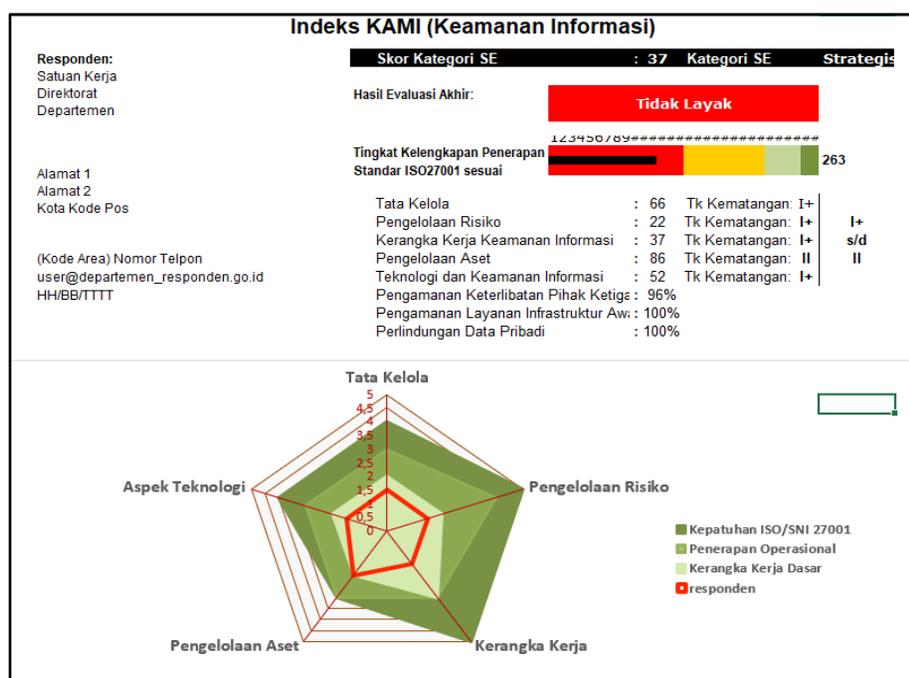
Untuk tahun 2024 berdasarkan self Assesment atau penilaian mandiri maka hasil nilai Indeks KAMI dari 6 area penilaian adalah 263 dari target tahun 2024 sebesar 300 sehingga persentase yang didapatkan adalah  $263/300 \times 100\% = 87,67\%$

Tabel 2.30  
 Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil nilai per area Indeks KAMI	na	na	na	na	263
2	target indeks KAMI yang ditetapkan	na	na	na	na	300
	Persentase	na	na	na	na	87,67

Tabel 2.31  
 Nilai Indeks KAMI Kabupaten Temanggung

Tahun	Nilai	Metode Penilaian
2020	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2021	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2022	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2023	N/A	Tidak melakukan penilaian Indeks KAMI
2024	263	<i>Self Assesment</i>



Gambar 2.6  
 Hasil Penilaian Mandiri Indeks KAMI Tahun 2024

Tabel 2.32  
 Tabel Penilaian Indeks KAMI

	[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis	Status	Skor
	Karakteristik Instansi/Perusahaan		
1.1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar	C	1
1.2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar	C	1
1.3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional dan internasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus	B	2
1.4	Menggunakan teknik 1.5kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi	B	2
1.5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna	A	5
1.6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi	B	2
1.7	Tingkat klasifikasi/kekritisn Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa	B	2
1.8	Tingkat kekritisn proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan	B	2
1.9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih [C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih	C	1

	[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis	Status	Skor
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan mengakibatkan kerugian finansial)	C	1

Tabel 2.33

Kategori Sistem Elektronik Untuk penilaian indek KAMI

<b>KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK</b>				
<b>Rendah</b>		<b>Skor Akhir</b>		<b>Status Kesiapan</b>
10	15	0	174	Tidak Layak
		175	312	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		313	535	Cukup Baik
		536	645	Baik
<b>Tinggi</b>		<b>Skor Akhir</b>		<b>Status Kesiapan</b>
16	34	0	272	Tidak Layak
		273	455	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		456	583	Cukup Baik
		584	645	Baik
<b>Strategis</b>		<b>Skor Akhir</b>		<b>Status Kesiapan</b>
35	50	0	333	Tidak Layak
		334	535	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar
		536	609	Cukup Baik
		610	645	Baik

Berdasarkan klasifikasi system elektronik yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung maka hasil dari Penilaian kategori system elektronik mendapatkan nilai 19 sehingga masuk dalam kategori Tinggi. Sedangkan untuk nilai akhir indek KAMI mendapatkan nilai 263 untuk kategori sistem elektronik dengan kategori tinggi masuk ke dalam klasifikasi TIDAK LAYAK. Sehingga dalam Tahun 2024 ini berdasarkan target yang ada adalah meningkatkan nilai menjadi minimal 300 untuk masuk dalam kategori Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.

h. Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assesment) yang digunakan untuk pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi pengamanan untuk

meminimalisir celah kerawanan yang terdapat dalam suatu sistem informasi. ITSA dilaksanakan oleh BSSN dengan prosedur sebagai berikut:



Gambar 2.7  
Alur Layanan ITSA

Dikarenakan keterbatasan kuota ITSA yang dapat dilaksanakan oleh BSSN maka Pemerintah Daerah dapat Melaksanakan secara mandiri pengujian ITSA tersebut dengan syarat sudah mempunyai personil yang memiliki kualifikasi sebagai Pentester dan mempunyai sertifikasi. Untuk pemerintah Kabupaten Temanggung sudah mempunyai 1 orang yang dapat melakukan pengujian tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan instansi Pembina yaitu BSSN. Dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada maka tetap dibutuhkan untuk setiap saat mengupdate kemampuan yang dimiliki oleh personil pentester tersebut.

Dari semua aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung tentunya tidak dapat untuk dapat dilakukan pengujian semua aplikasi tersebut, sehingga untuk pengujian dapat dilakukan dengan target pengujian 5 aplikasi per tahun. Dan Apabila ada aplikasi yang baru dibuat atau diupdate tentunya tetap akan dilaksanakan pengujian ulang.

Untuk memperoleh angka Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah dengan menggunakan rumus jumlah aplikasi yang sudah dilakukan

VA dibagi jumlah target aplikasi yang akan dilaksanakan Vulnerability Assesment (VA) dikali 100%. Pada Triwulan I Tahun 2024 Dinkominfo Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan VA pada 8 aplikasi dari target 15 aplikasi sehingga persentase adalah 53%.

Tabel 2.34  
 Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi  
 Pada Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah aplikasi yang sudah dilakukan VA	nna	na	na	na	8
2	Jumlah target aplikasi yang akan dilaksanakan	na	na	na	na	15
	Persentase					53

Tabel 2.35  
 Aplikasi yang sudah dilakukan Vulnerability Assesment  
 (VA) Tahun 2024

No	Uraian	Pelaksanaan VA Sudah/belum	Kategori Bug
1	Mediacenter.temanggungkab.go.id	Sudah	Critical
2	Temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
3	Sid.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
4.	Sipt.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
5	Jdihdprd.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
6	jdih.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
7	ppid.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
8	kinerja.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium

Untuk Pengujian VA ini terhadap 5 aplikasi yang dilaksanakan Tahun 2024 ini maka didapatkan untuk kategori Critical ada 1 Aplikasi yaitu *mediacenter.temanggungkab.go.id* yang perlu mendapatkan perhatian karena adanya lubang-lubang keamanan yang

ada sehingga dari bidang Statistik dan persandian sudah memberikan umpan balik kepada bidang TIK untuk segera mengupdate website tersebut dan sudah dilaksanakan secara bertahap.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator kinerja utama yang belum mencapai target Renstra 2019-2023, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinkominfo dari 2 indikator kinerja utama terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target 100%, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 hanya terealisasi 2,80 atau hanya tercapai 93,33%. Capaian Indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 ini tentunya menjadi bahan evaluasi bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada semua domain, utamanya pada domain manajemen yang nilainya masih relatif rendah. Namun demikian dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, antara lain:
  - a. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan karena dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda.
  - b. Dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung belum optimal.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja tahun 2024 antara lain:

1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Dinkominfo dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Memberikan pemahaman para pimpinan SKPD, stakeholder dan masyarakat agar dapat bersinergi dengan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan dan pengembangan teknologi informasi guna mendorong akselerasi pembangunan.
4. Memberikan sosialisasi, edukasi dan pencerahan kepada masyarakat untuk mengubah mindset (pola pikir) masyarakat menuju “masyarakat informasi” Kabupaten Temanggung.
5. Menempatkan pembangunan teknologi informasi sebagai prioritas utama pembangunan, di samping pembangunan pembangunan prioritas lainnya.
6. Meningkatkan intensitas sosialisasi, pendekatan dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menuju tata pemerintahan yang baik.

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinkominfo sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, yang bersumber dari dana DBHCHT.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%	6.457.050.764	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%	6.957.050.764		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan		100	&	4.051.189.764	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan		100	&	4.051.189.764		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	36	Orang/bulan	4.051.189.764		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	36	Orang/bulan	4.051.189.764		
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian		100	%		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian		100	%	500.000.000		
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	7000	orang	500.000.000	Penambahan pagu anggaran sumber dana DBHCHT	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum		100	%	244.456.100	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum		100	%	244.456.100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	5	paket	4.992.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	5	paket	4.992.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	5	paket	152.019.600		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	5	paket	152.019.600		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	3	paket	16.001.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	3	paket	16.001.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	2	paket	9.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	2	paket	9.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	27.982.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	27.982.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	33.961.500		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	33.961.500	
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.093.411.400</b>	<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.093.411.400</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	laporan	3.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	laporan	3.150.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	7.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	11.422.400		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	11.422.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	2.071.839.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	2.071.839.000	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang siap pakai</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>67.993.500</b>	<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang siap pakai</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>67.993.500</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	26	unit	67.993.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	26	unit	67.993.500	
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 3. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo</b>		<b>40</b> <b>100</b> <b>90</b>	<b>%</b> <b>%</b> <b>%</b>	<b>1.029.911.600</b>	<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 3. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo</b>		<b>40</b> <b>100</b> <b>90</b>	<b>%</b> <b>%</b> <b>%</b>	<b>1.029.911.600</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>		<b>12</b>	<b>dokumen</b>	<b>1.029.911.600</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>		<b>12</b>	<b>dokumen</b>	<b>1.029.911.600</b>	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Temanggung	45742	Permohonan	4.923.600		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Temanggung	45742	Permohonan	4.923.600	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Temanggung	33	media	1.014.989.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Temanggung	33	media	1.014.989.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Temanggung	309	orang	9.999.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Temanggung	309	orang	9.999.000	
<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>1. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 2. Persentase layanan publik secara elektronik</b>		100 55	% %	1.274.889.125	<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>1. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 2. Persentase layanan publik secara elektronik</b>		100 55	% %	1.274.889.125	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>106</b>	<b>unit</b>	<b>1.274.889.125</b>	<b>2</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>106</b>	<b>unit</b>	<b>1.274.889.125</b>	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	10	dokumen	1.600.000		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	10	dokumen	1.600.000	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	8	aplikasi	25.000.000		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	8	aplikasi	25.000.000	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Temanggung	46	PD	1.203.789.125		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Temanggung	46	PD	1.203.789.125	
	PImplementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Temanggung	10	program	44.500.000		PImplementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Temanggung	10	program	44.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral		100	%	82.500.000	D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral		100	%	82.500.000	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung		3	dokum en	82.500.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung		3	dokum en	82.500.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Temanggung	5	dokum en	75.000.000		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Temanggung	5	dokum en	75.000.000	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Temanggung	5	dokum en	7.500.000		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Temanggung	5	dokum en	7.500.000	
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase penilaian resiko keamanan informasi 2. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		66,7 60	% %	47.000.000	E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase penilaian resiko keamanan informasi 2. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		66,7 60	% %	47.000.000	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi		46	OPD	47.000.000	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi		46	OPD	47.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	300	laporan	22.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	300	laporan	22.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Temanggung	46	PD	25.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Temanggung	46	PD	25.000.000	
	<b>JUMLAH</b>					<b>8.891.351.489</b>		<b>JUMLAH</b>					<b>9.391.351.489</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinkominfo. Namun dalam proses ini Dinkominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinkominfo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Program dan kegiatan yang diusulkan dari aspirasi masyarakat kepada Dinkominfo tahun 2025 yang bersifat spesifik tidak ada usulan.

## 2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinkominfo ada 10 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Layanan Zoom Meeting & Cloud drive after pandemi	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Langganan Zoom meeting untuk masing - masing OPD dengan multi participant ( max 100 participant) & pembuatan cloud drive untuk penyimpanan data	2 Akun Zoom berlisensi cloud.temanggungkab.go.id	1. Kemudahan dalam setiap rapat virtual antar instansi dan OPD dimasa pandemi, karena keterbatasan ruang & waktu ketika pandemi. 2. Kemudahan penyimpanan data yang bisa di upload dan di download kapan saja dimana saja tanpa harus membawa alat penyimpanan.	2021
2	Aplikasi E-Office	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi eoffice	aplikasi eoffice web	Kemudahan dalam proses surat menyurat secara elektronik	2022
3	SID Terintegrasi	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi SID terintegrasi	aplikasi SID untuk masing masing desa	Kemudahan perangkat desa dalam mengelola data pemerintah Desa dan layanan pemerintahan desa	2023
4	GIS Temanggungkab	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi GIS terintegrasi	Aplikasi GIS Terintegrasi	Kemudahan untuk penyajian data yang terintegrasi oleh beberapa aplikasi eksisting baik krmiskinan	2024

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/Tahun
		SDM	Anggaran				
						,keperintahan, kepegawaian, kesehatan dan ekonomi yang bermanfaat sebagai sumber informasi dan analisis pengambilan kebijakan	
5	PMT	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi PMT pengendalian menara	Aplikasi PMT	Kemudahan permohonan rekomendasi pengajuan menara baru atau pengajuan ijin menara yang sudah existing berdasarkan Perda dan peta KP2B dari DPUPR Kab Temanggung	2024
6	Sarana Informasi Interaktif Dinkominfo dan Layanan Publik Pemkab Temanggung <b>RuDiMas</b> (Ruang Digital Masyarakat)	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Penyediaan Ruang Podcast , pembentukan tim lintas sektoral	Memberikan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu kepada masyarakat termasuk program pemerintah yang terstruktur, mengikuti trend dan perkembangan	Informasi tersampaikan ke masyarakat, dan dapat dipelajari melalui podcast yang disampaikan	2024
7	Layanan Lapran dan Aduan Masyarakat <b>WAGE</b> (Whatsapp Gateway)	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Menyusun Peraturan Bupati tentang Mean Time To Response (MTTR) Laporan dan Aduan, serta Reward and Punishmentnya.	Layanan aduan masyarakat melalui Whatsapp yang bisa diakses melalui website dan aplikasi whatsapp itu sendiri, dengan nomor 085878600900	penyebaran informasi program/kegiatan pemerintah kepada masyarakat dan aduan masyarakat kepada pemerintah bisa tersampaikan secara cepat.	2024
8	Diskusi Seputar Layanan Publik Pemkab Temanggung <b>"RUBRIK DIGITAL"</b>	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Intervensi Teknologi informasi dengan pemanfaatan google form/aplikasi sistematis lainnya dalam pengaturan tema, trend isu dan penjadwalan	Penyampaian program kerja pemerintah yang terstruktur, mengikuti trend dan perkembangan	Masyarakat mendapatkan informasi layanan umum Pemkab Temanggung dan dapat berdialog secara interaktif	2024

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/Tahun
		SDM	Anggaran				
9	Analisis Media Sosial Kabupaten Temanggung	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Dokumen laporan bulanan Analisis Media Sosial	Pemerintah Kabupaten Temanggung mengetahui sentimen dan opini publik serta mengetahui engagement Instagram untuk masing-masing akun OPD	2023-sekarang
10	Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pemerintah Desa dan Kelurahan melalui Sertifikat Elektronik BsRE	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Kepala Desa dan Lurah se Kab. Temanggung memiliki TTE	Layanan publik menjadi lebih efisien	2024-sekarang

## 2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinkominfo ada 13 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KIP Award Peringkat IX Tahun 2021	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
2	Juara II Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng tahun 2021	Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
3	Dukungan kerjasama dan kontribusi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	Bupati Temanggung	Kabupaten	Dinkominfo
4	Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
5	Penghargaan, ERTE FM Temanggung Jateng Terbaik I Kategori Radio Ramah Anak Tahun 2022	Persatuan Radio LPPL se-Indonesia (Persada)	Nasional	Dinkominfo
6	Anugrah Penyiaran Jawa tengah 2022, LPPL Radio ERTE FM Juara I Lembaga	Komisi Penyiaran Indonesia	Regional	Dinkominfo

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	Penyiaran Publik Lokal Terbaik 2022	Daerah(KPID Prov Jateng)		
7	KIP Award Peringkat VIII Tahun 2023	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
8	Juara I Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng tahun 2023	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
9	Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2023. Juara 3 (Temanggung TV)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
10	Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2023. Juara 2 (Radio eRTe FM)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
11	INDONESIA PERSADA.ID AWARD IV TAHUN 2023. Terbaik I	Persatuan Radio TV Publik Seluruh Indonesia	Nasional	Dinkominfo
12	Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2023. Juara 1	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
13	Penghargaan sebagai Walidata Kabupaten Temanggung	BPS Kab. Temanggung	Kabupaten	Dinkominfo

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemenkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional Kemenkominfo fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Arah kebijakan Kemenkominfo antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan;
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan;
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer;
6. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;
7. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kemenkominfo meliputi:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo**

Tujuan Dinkominfo yang dirumuskan dalam Renstra Dinkominfo 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi; dan
2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai atas tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik, untuk tujuan nomor 1; dan

2. Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik, untuk tujuan nomor 2.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfo.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinkominfo Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target Tahun 2025	Target Kondisi Akhir 2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			Nilai	90,15	90,35
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	Persen	40	45
					Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	Persen	100	100
					Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	Persen	90	100
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Ketersediaan data statistik sektoral	Persen	100	100
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Nilai	3,35	3,50
				Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	Persen	100	100
					Persentase layanan publik secara elektronik	Persen	55	60
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	Persen	66,7	100
					Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	Persen	60	100

Sumber: Renstra Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinkominfo Tahun 2024-2026.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	7	4	2	3	7
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>		
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.457.050.764</b>	<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.957.050.764</b>	<b>500.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.051.189.764</b>	<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.051.189.764</b>	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.189.764		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.189.764	-
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
		0		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	500.000.000	500.000.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>244.456.100</b>	<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>244.456.100</b>	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.019.600		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.019.600	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.001.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.001.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	-
	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.982.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	27.982.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.961.500		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.961.500	-
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.093.411.400</b>	<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.093.411.400</b>	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	-

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	7	4	2	3	7
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.422.400		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.422.400	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.071.839.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.071.839.000	-
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.993.500</b>	<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.993.500</b>	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.993.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.993.500	-
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.029.911.600</b>	<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.029.911.600</b>	-
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.029.911.600</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.029.911.600</b>	-
	Pelayanan Informasi Publik	4.923.600		Pelayanan Informasi Publik	4.923.600	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.014.989.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.014.989.000	-
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9.999.000		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	9.999.000	-
<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>1.274.889.125</b>	<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>1.274.889.125</b>	-
<b>2</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.274.889.125</b>	<b>2</b>	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.274.889.125</b>	-
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	1.600.000		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	1.600.000	-
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	25.000.000		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	25.000.000	-
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.203.789.125		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.203.789.125	-

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	2	7	4	2	3	7
	PImplementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	44.500.000		PImplementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	44.500.000	-
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>		
<b>D</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>82.500.000</b>	<b>D</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>82.500.000</b>	-
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>82.500.000</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>82.500.000</b>	-
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	75.000.000		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	75.000.000	-
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	7.500.000		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	7.500.000	-
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>			<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>		
<b>E</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>47.000.000</b>	<b>E</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>47.000.000</b>	-
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.000.000</b>	<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.000.000</b>	-
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	22.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	22.000.000	-
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.891.351.489</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>9.391.351.489</b>	<b>500.000.000</b>

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 500.000.000,- dikarenakan ada penambahan sub kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT yaitu sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang semula tidak masuk pada rancangan awal Renja 2025.

Tabel 4.2  
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Dinas Komunikasi dan Informatika								9.391.351.489					10.347.592.054		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								9.391.351.489					10.347.592.054		
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								9.261.851.489					10.205.142.054		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6.957.050.764				7.400.233.794		
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.051.189.764				4.253.761.394	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan administrasi keuangan	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 %	36 Orang/bulan	100 %	4.051.189.764	PAD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.253.761.394
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								500.000.000				500.000.000
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7000 Orang	100 %	500.000.000	DBH CHT		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7000 Orang	500.000.000
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								244.456.100				101.684.000
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	5 Paket	100 %	4.992.000	PAD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.495.050
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	5 Paket	100 %	152.019.600	PAD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	3 Paket	100 %	16.001.000	PAD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.601.100	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	2 Paket	100 %	9.500.000	PAD		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.450.000	
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	27.982.000	PAD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.780.200	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan administrasi umum	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	33.961.500	PAD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	37.357.650	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.093.411.400				2.469.995.000
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang	Kab. Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	3.150.000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.465.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	7.000.000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.700.000
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	11.422.400	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.602.920
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	12 Laporan	100 %	2.071.839.000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.446.227.080
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.993.500					74.793.400	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang siap pakai	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	-	26 Unit	100 %	67.993.500	PAD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	74.793.400
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.029.911.600					1.381.398.260	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.029.911.600					1.381.398.260	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik												
					2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai	Jumlah dokumen hasil	Kab. Temanggung,	100 % 40 %	45742 Permohonan	12 Dokumen	4.923.600	PAD		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan	45742 Permohonan	5.415.960

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
															7	8
		melalui kanal media elektronik dan non elektronik 1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	peraturan perundangan	pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Temanggung, Jampiroso							sesuai peraturan perundangan				
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 % 40 %	33 Media	12 Dokumen	1.014.989.000	PAD	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	33 Media	1.348.482.300	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik											
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 % 40 %	309 Orang	12 Dokumen	9.999.000	PAD	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	309 Orang	27.500.000	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						1.274.889.125				1.423.510.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.274.889.125				1.423.510.000	
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi											
					1. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 2. Persentase layanan publik secara elektronik	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 55 %	10 Dokumen	106 Unit	1.600.000	PAD	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	10 Dokumen	1.760.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah											
						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 % 55 %	8 Aplikasi	106 Unit	25.000.000	PAD	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	8 Aplikasi	27.500.000
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
						Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 % 55 %	46 Perangkat Daerah	106 Unit	1.203.789.125	PAD	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	46 Perangkat Daerah	1.345.300.000
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas											
						Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah pusat data dan sistem informasi Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 % 55 %	10 Program	106 Unit	44.500.000	PAD	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	10 Program	48.950.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					82.500.000					90.750.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					82.500.000					90.750.000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					82.500.000					90.750.000	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia											
					Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 %	5 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000	PAD	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen	82.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar												
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	100 %	5 Dokumen	3 Dokum en	7.500.000	PAD	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dokumen	8.250.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					47.000.000					51.700.000		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					47.000.000					51.700.000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					47.000.000					51.700.000		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik												
					2. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah 1. Persentase penilaian resiko keamanan informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	60 % 66,7%	300 Laporan	46 OPD	22.000.000	PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	300 Laporan	24.200.000	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan	Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	60 % 66,7%	46 Perangkat Daerah	46 OPD	25.000.000	PAD	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46 Perangkat Daerah	27.500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Keamanan Informasi										
<b>TOTAL</b>									<b>9.391.351.489</b>					<b>10.347.592.054</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinkominfo Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinkominfo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinkominfo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinkominfo Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 83,65 %, realisasi Belanja Modal sebesar 9,22%, belanja transfer sebesar 7,13, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 34,9%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 1,95%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinkominfo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.391.351.489,- yang terdiri dari 5 program antara lain; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinkominfo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006